

# An Empirical and Theoretical Literature Reviews on Creative Economy of Culinary in South Heritage Town Square of Surakarta Palace (Central Java, Indonesia)

Nur Achmad<sup>1</sup>, Sri Murwanti<sup>2</sup>, Siddiq Purnomo<sup>3</sup>, Muhammad Sholahuddin<sup>4\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

\*Email: [Muhhammad.sholahuddin@ums.ac.id](mailto:Muhhammad.sholahuddin@ums.ac.id)

## Abstrak

### Keywords:

SMEs; Street Vendors; Creative Economy; Heritage; SWOT

*Keraton Surakarta is one of the tourism destinations in Surakarta, Central Java. The southern side Keraton Surakarta looks rundown with quite untidy culinary street vendors and it was well-known as an area for night prostitution a decade ago. Previous research has already identified a mapping and economic potential of creative SMEs of culinary occupying in the Alun-Alun Kidul Keraton Kasunanan Surakarta. This literature and empirical study consists of three sections. First, it presents creative economic potential in the Alun-Alun Kidul Keraton Kasunanan Surakarta. Second, it discusses the various regulations on the management of street vendors. Third, it presents various empirical studies on the creative economy and the arrangement of the Alun-Alun Kidul. Content analysis of literature study was conducted to generate a pre-analysis strengths, weaknesses, opportunities and challenges of the creative economy in the Alun-Alun Kidul Keraton Kasunanan Surakarta. The results of this study show that the Alun-Alun Kidul Keraton Kasunanan Surakarta becomes a recreation potential for medium-small income people. Besides, the regulation issued by local government and the Kasunanan Surakarta prohibit it to be permanent place for street vendors. In addition, various empirical studies show the importance of managing and structuring the Alun-Alun Kidul Keraton Kasunanan Surakarta as small recreational place for public while accommodating street vendors leads to good and fair situation for all parties.*

## 1. PENDAHULUAN

Kawasan Alun-alun Surakarta merupakan suatu kawasan yang memiliki nilai historis berupa bangunan dan desain arsitektur lama. Kawasan ini dulunya merupakan bagian dari salah satu pusat pemerintahan kerajaan di Jawa Tengah yaitu Kraton Surakarta [1]. Status ruang publik yang diberlakukan terhadap kedua

alun-alun tersebut ditambah lagi dibukanya Keraton Surakarta sebagai salah satu objek wisata di Surakarta memberikan implikasi salah satunya adalah masuknya pedagang informal yang sebenarnya mendatangkan masalah terhadap kelestarian kawasan Alun-alun Surakarta ini [2]. Banyak sekali dijumpai pedagang kaki lima yang memenuhi kawasan tersebut sehingga

menutupi keberadaannya sebagai kawasan yang mempunyai nilai historis tinggi. Akibat pemekaran kompleks Alun-alun Utara dan Selatan tersebut yang dulunya sedemikian pesatnya menjadi pelataran bagi pedagang kaki lima dan parkir kendaraan terutama kendaraan wisata menjadikan makna kompleks bangunan kraton dan alun-alun sebagai cagar budaya semakin luntur.

Masalah lainnya adalah terdapat kontradiksi dan konflik kepentingan antara aspek ekonomi dengan mempertahankan sektor informal dan mempertahankan objek pariwisata Keraton Surakarta. Kemudian lebih lanjut lagi dapat teridentifikasi bahwa adanya kecenderungan pemanfaatan ruang publik untuk kepentingan sebagian orang yang menjadikan makna penggunaannya bergeser [3]. Hal tersebut ditambah lagi dengan kondisi struktur ruang yang ada di Kawasan Alun-alun Surakarta yang pada saat ini tidak menggambarkan jawaban terhadap kebutuhan parkir dan pedagang kaki lima karena jumlah pedagang kaki lima yang berderet-deret dan memenuhi ruas jalan dimulai dari Gapura Gladag, jalan lingkaran Alun-alun Utara, depan Masjid Agung Surakarta dan Alun-alun Selatan setiap tahun bertambah jumlahnya terutama setelah adanya acara-acara yang diselenggarakan oleh pihak Kraton yang mengundang banyak pengunjung seperti Penyelenggaraan Upacara/Kirab 1 Suro. Sehingga dampak yang ditimbulkan pada Kawasan Alun-alun Surakarta menunjukkan bahwa dampak perkembangan aktivitas perdagangan dan non budaya lainnya seperti keberadaan PKL di kawasan tersebut telah menghilangkan wajah kawasan sebagai kawasan cagar budaya dan hilangnya kesan estetika dan kesan monumental kawasan karena aktivitas perdagangan ini telah menimbulkan kekumuhan dan kekotoran pada wajah kawasan.

Pedagang kaki lima (PKL) yang menempati ruang publik kota adalah PKL yang berada di Alun-alun Selatan Kraton Kasunanan Surakarta. Alun-alun ini merupakan salah satu ruang publik kota yang dimanfaatkan oleh masyarakat

Surakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu luang. Banyaknya masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya yang memanfaatkan ruang publik ini memunculkan peluang bagi PKL untuk menjajakan dagangannya. Peluang usaha yang ditimbulkan oleh alun-alun selatan seakan menjadi magnet yang menyebabkan menjamurnya PKL disana. Keberadaan PKL ini sepenuhnya dikelola oleh pihak kraton dan memberikan keuntungan finansial bagi pihak kraton karena para pedagang diwajibkan membayar uang retribusi. Alun-alun selatan ini juga memunculkan peluang bagi para pedagang di luar Kota Surakarta untuk berjualan disana. Munculnya pedagang kaki lima telah memberikan berbagai dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif PKL bagi kehidupan kota adalah karena mereka menempati lokasi yang tidak seharusnya. Maka terjadi penurunan kualitas ruang kota yang diakibatkan oleh perkembangan PKL yang semakin tidak terkendali setiap tahunnya.

Salah satu pusat keramaian kota yang banyak digunakan oleh PKL untuk berjualan adalah ruang publik kota. Ruang publik memiliki aksesibilitas tinggi yang dapat mendatangkan konsumen bagi PKL. Ruang publik merupakan ruang terbuka yang disediakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat kota dan sebagai wadah untuk menampung aktivitas masyarakat kota. Ruang terbuka adalah bagian dari ruang yang memiliki definisi sebagai wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik [4]. Kemampuan ruang publik untuk menampung aktivitas masyarakat semakin berkurang karena sebagai besar PKL menempati ruang publik. Menjamurnya PKL membuat keindahan atau estetika ruang publik menjadi menurun, karena disebabkan sampah yang dihasilkan oleh PKL.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti baik di pagi hari maupun di malam hari bahwa dengan adanya PKL ini membuat estetika alun-alun kidul menjadi tidak rapi atau terkesan semrawut, rata-rata pedagang di HIK

(Hidangan istimewa kampung) menempati di pinggir sebelah selatan dan barat menempel dengan dinding. Selain itu juga ciri khas pedagang dialun-alun selatan adalah bakso bakar yang hampir ada disetiap sudut alun-alun mulai selatan, barat, utara dan timur terletak di pinggir jalan. Peneliti juga mengamati bahwa alun-alun kidul terasa kumuh dan tidak bersih.

Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang telah diformalkan dan dipindahkan ke tempat penampungan dan pasar malam kuliner mencerminkan pertumbuhan ekonomi Surakarta yang lebih luas dan peningkatan aktivitas perdagangan. Dengan 658 tempat berlindung bagi para penjual yang dibangun oleh kota di berbagai lokasi hingga saat ini, pendekatan pihak berwenang terhadap para pedagang kaki lima berkontribusi pada reputasi kontemporer Surakarta untuk kebersihan dan keindahan. Secara keseluruhan, dengan keterlibatan semua anggota masyarakat dalam ekonomi perkotaan yang dinamis, Surakarta telah muncul sebagai tujuan untuk keahlian memasak, mode, dan seni kreatif di Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah pengunjung ke Surakarta telah berkembang pesat dalam tujuh tahun terakhir. Produk domestik regional bruto (PDRB) Surakarta meningkat rata-rata enam persen pada periode 2005-2013. Jumlah PKL direlokasi dan pertumbuhan ekonomi kota meningkat pada tingkat yang sama. PDRB adalah ukuran pertumbuhan yang sangat kasar, dan tidak serta merta menunjukkan hubungan sebab akibat antara kedua peningkatan ini - tetapi yang ditunjukkannya adalah bahwa relokasi pedagang kaki lima (membuat kota lebih bersih dan lebih indah) telah berjalan paralel dan konsisten dengan pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Kita tahu sektor informal saat ini melayani tidak hanya penduduk lokal yang dianggap 'membutuhkan' makanan yang lebih murah, tetapi juga menyediakan produk bernilai lebih tinggi bagi banyak pengunjung domestik dan internasional yang lebih makmur.

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil kontribusi kepada:

1. Perkembangan ilmu manajemen, bahwa banyak ilmu manajemen yang diterapkan dalam menetapkan potensi ekonomi kreatif dan bisnis PKL khususnya wisata kuliner di alun-alun kidul surakarta.
2. Dosen dan mahasiswa manajemen, mempunyai pengalaman dan wawasan yang lebih luas dalam kepeduliannya terhadap ekonomi kuliner di sekitar mereka.
3. Pelaku bisnis pun dapat memahami bagaimana cara berbisnis yang baik dan benar.

Penelitian tahun kedua ini memiliki tujuan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan ekonomi kreatif wisata kuliner di alun-alun kidul keraton Surakarta.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif historis dimana penelitian yang dilakukan adalah penelitian analisis deskriptif dengan memanfaatkan sumber data berupa hasil penelitian dan pemikiran peneliti sebelumnya untuk menghasilkan penelitian baru di bidang yang sama. Pada tahun pertama, peneliti memanfaatkan penelitian terdahulu, studi kebijakan dari keraton dan pemerintah daerah serta melakukan wawancara mendalam dengan narasumber kunci mengenai rencana penataan kawasan lingkungan wisata keraton, kemudian dianalisis dengan analisis isi (content analysis). Sedangkan tahun kedua juga dilakukan penelitian kualitatif dengan wawancara langsung dan dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan para stakeholder untuk merencanakan strategi penataan dan revitalisasi alun-alun kidul berbasis kearifan lokal. Ruang lingkup penelitian ini pada tahun kedua ruang lingkup penelitian adalah para PKL dan nara sumber kunci lainnya untuk melakukan FGD. Perumusan tujuan akhir dari penelitian ini adalah tersusun analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan ekonomi kreatif wisata kuliner di alun-alun kidul keraton Surakarta.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Potensi Ekonomi Kreatif di Alun-Alun Kidul Surakarta

Kota Surakarta memiliki luas wilayah 44,1 km<sup>2</sup> (0,14 % dari luas Jawa Tengah). Kota yang terkenal dengan kentalnya budaya Jawa dan memiliki salah satu peninggalan monarki yang menjadi ikon kota yaitu Keraton Kasunanan Surakarta. Keraton Kasunanan Surakarta masih berfungsi sebagai mana mestinya dan sampai sekarang masih menjalankan sistem keratonnya, namun pihak Keraton Surakarta tidak ikut campur dalam sistem Pemerintah Kota Surakarta, tidak seperti Keraton Yogyakarta. Selain sebagai cagar budaya di Kota Surakarta, Keraton Surakarta dijadikan tempat wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun asing. Keraton Kasunanan Surakarta memiliki 2 alun-alun yaitu alun-alun selatan dan alun-alun utara. Alun-alun berfungsi untuk tempat rekreasi keluarga kraton dan kerabat kraton. Alun-alun merupakan ciri khas suatu kabupaten/kota di pulau Jawa yang berperan sebagai halaman dari ibu kota Negara atau kota pada masa lampau. Konsep alun-alun terikat erat dengan catur tunggal yang merupakan konsep tatanan kota Jawa dengan alun-alun sebagai pusat dikelilingi oleh gedung peribadahan, perumahan, pasar, dan pusat pemerintahan [5].

Alun-alun Selatan atau yang biasa disebut Alun-alun Kidul (Alkid) Keraton Surakarta sebagai salah satu peninggalan budaya dan sejarah di Kota Surakarta pada dasarnya merupakan suatu kawasan yang memiliki nilai historis dan merupakan sebuah kawasan yang memiliki warisan yang berupa bangunan dan desain arsitektur tertentu yang mencirikan keadaan masa lalu ataupun kondisi yang ada pada masa tersebut [6]. Kawasan ini dulunya merupakan bagian dari salah satu pusat pemerintahan kerajaan di Jawa Tengah (Keraton Surakarta). Pada awal berdirinya keraton dan hingga masa kemerdekaan, kawasan ini diperuntukkan sebagai bagian ruang publik untuk

menunjang aktivitas dari pihak Keraton Pakubuwono. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membawa pengaruh terhadap status kraton sebagai bagian dari pengaruh aristokrat [7].

Pada akhirnya, terdapat pengaruh pada perubahan pemanfaatan Alun-alun Kidul Keraton Surakarta yang kemudian berkembang sebagai ruang publik dan bisa diakses oleh segala kalangan. Status ruang publik yang diberlakukan terhadap alun-alun ditambah lagi dibukanya Keraton Surakarta sebagai salah satu objek wisata di Surakarta kemudian memberikan implikasi salah satunya adalah masuknya pedagang informal di kawasan Alun-alun Selatan Keraton Kasunanan Surakarta ini. Banyak sekali dijumpai pedagang kaki lima yang memenuhi kawasan tersebut sehingga menutupi keberadaannya sebagai kawasan yang mempunyai nilai historis tinggi. Alasan sebagian besar Pedagang Kaki Lima berdagang disini karena birokrasinya yang mudah. Hanya melihat celah yang kosong, melapor pada pihak kraton, meminta ijin, mau menaati peraturan yang ada, akhirnya ijin pun diberikan, dan pedagang berhak berdagang di tempat tersebut. Semakin hari semakin banyak pihak yang berdagang dan semakin banyak pula pengunjung yang berdatangan. Hal ini menyebabkan Alun-alun Selatan Keraton Kasunanan Surakarta seakan menjadi tempat kegiatan masyarakat sekitar untuk bersosialisasi dan bersantai serta berbagai kegiatan-kegiatan lainnya.

Sekarang ini, Alun-alun Kidul Keraton Surakarta menjadi tempat rekreasi dan berkumpulnya masyarakat Surakarta untuk menghabiskan waktu luang, karena semakin ramai dikunjungi maka alun-alun Kidul memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Munculnya potensi ekonomi alun-alun Kidul ini mengakibatkan timbulnya aktivitas ekonomi [8]. Aktivitas ekonomi perkotaan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu sektor formal dan sektor informal. Aktivitas disebut formal atau tidak yang membedakannya adalah birokrasi dalam bidang perijinan. Sektor formal cenderung lebih banyak

mendapatkan perlindungan dari pemerintah daripada usaha informal. Sektor formal mendapat prioritas dari pemerintah karena dianggap dapat mengatasi masalah perekonomian. Anggapan ini membuat sektor formal banyak dicari oleh masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, pada kenyataannya sektor formal sudah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan [9].

Dampak dari kurangnya lapangan pekerjaan di sektor formal menyebabkan munculnya sektor informal di perkotaan. Sedangkan pengertian sektor informal menurut Kamus Tata Ruang (1997) adalah usaha pelayanan tidak resmi yang dilakukan perorangan dengan tujuan untuk memperoleh imbalan terhadap jasa atau bantuan pelayanan yang diberikan [10]. Pemerintah hanya menyediakan ruang-ruang untuk pengembangan kegiatan formal. Namun, seiring berjalannya waktu keberadaan sektor formal mendorong munculnya kegiatan sektor informal untuk menyediakan kebutuhan para pekerja sektor formal. Setiap pelaku sektor informal memiliki pilihan yang berbeda dalam upaya memenuhi barang dagangannya. Upaya untuk memperoleh barang dagangannya ini disebut rantai sektor informal. Salah satu pelaku sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) [11].

Peraturan Daerah Kota Surakarta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Tahun 1995 mendefinisikan PKL adalah setiap orang yang melakukan usaha dagang maupun jasa di tanah milik negara [12]. Dari definisi ini dapat diartikan bahwa lokasi yang dijadikan oleh PKL untuk berjualan tidak memiliki ijin/ilegal karena tanah merupakan milik negara yang berarti diperuntukkan kepada publik, bukan untuk komersil [13]. Menurut Permen No. 41 Tahun (2012), PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau

swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Sifat PKL yang tidak menetap atau sementara ini merupakan salah satu karakteristik yang mencerminkan keberadaan PKL itu sendiri. mereka tidak memiliki kebebasan untuk mengembangkan usaha karena tidak memiliki ijin usaha secara resmi. Selain sifatnya yang tidak menetap, PKL memiliki karakteristik yang lain diantaranya modal usaha terbatas atau kecil, karena sebagian pedagang memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah. Sebagian besar pedagang juga tidak memiliki kemampuan khusus yang mumpuni untuk bekerja di sektor formal. Karakteristik PKL adalah aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel, skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal usaha dan pendapatan yang umumnya relatif kecil.

Munculnya pedagang kaki lima telah memberikan berbagai dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Menurut Usman PKL merupakan sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal sehingga dapat mengurangi angka pengangguran [14]. Seiring berjalannya waktu angka angkatan kerja terus meningkat setiap tahunnya. Namun, jumlah angkatan kerja ini tidak seimbang dengan lapangan kerja formal yang disediakan oleh pemerintah. Salah satu lahan pekerjaan yang memungkinkan adalah sebagai pelaku sektor informal atau PKL. Disatu sisi PKL dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan kota karena mereka menempati lokasi yang tidak seharusnya. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah penurunan kualitas ruang kota yang diakibatkan oleh perkembangan PKL yang semakin tidak terkendali setiap tahunnya. Fenomena menjamurnya PKL di kota-kota ini seakan menjadi identitas kota-kota besar terutama di pusat keramaian. Berdasarkan Permen No. 41 tahun 2012 pasal 33 tentang penetapan lokasi PKL, para pedagang kaki lima berdagang di lokasi binaan yang ditetapkan bupati atau walikota. Lokasi

binaan terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara. Lokasi PKL yang bersifat permanen dilengkapi dengan aksesibilitas dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum. Sedangkan lokasi sementara, merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota.

PKL di alun-alun keraton Surakarta ini didominasi oleh pedagang yang berasal dari Kota Surakarta itu sendiri, namun tidak sedikit pedagang berasal dari Karesidenan Surakarta. Umumnya mereka melakukan migrasi dari daerah asalnya karena adanya peluang usaha yang ditawarkan oleh pihak kraton. Salah satu PKL di alun-alun selatan adalah penyewaan mainan anak-anak. PKL ini berasal dari Kabupaten Sukoharjo yang bermigrasi sementara ke Surakarta hanya untuk menyewakan jasa mainan. Sektor informal memiliki rantai ekonomi yang berfokus pada upaya PKL dalam memenuhi kebutuhan barang dagangannya. Rantai sektor informal disini diartikan, bahwa PKL ini membeli peralatan mainan mereka dari produsen mainan di Sukoharjo.

### 3.2. Revitalisasi Alun-Alun Kidul

Potensi ekonomi kreatif di Alun Alun Kidul tentu harus dikembangkan untuk mewujudkan perekonomian Kota Surakarta menjadi lebih makmur dan maju. Oleh karena itu berbagai kelemahan atau dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya PKL di Alun Alun Kidul Surakarta harus diminimalisir. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Archigreen revitalisasi kawasan wisata Kota Medan tahun 2018. Seiring pesatnya pertumbuhan dan pembangunan, Pagaruyung mulai kesulitan. Pertumbuhan pusat jajanan malam dengan fasilitas modern yang tak terbendung sedikit banyak berhasil mencuri pengunjung dari kalangan generasi muda. Untuk mengembalikan fungsi kawasan agar tetap menjadi salah satu objek wisata Kota

Medan, maka akan diterapkan konsep revitalisasi [15].

Pelaksanaan Focus Group Discussion yang dilakukan dengan para stakeholder, pemerintah dan masyarakat setempat menunjukkan cara pandang dan persepsi masyarakat, pemerintah, swasta pelaku bisnis. Hasil kajian yang merupakan temuan-temuan penelitian ini dimanfaatkan melalui rekayasa sosial dalam bentuk leaflet, poster dan buku saku yang bisa didiseminasikan kembali kepada para pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan manajemen daerah [16]. Pembenahan fasilitas pariwisata juga harus dilakukan dalam tahap revitalisasi ini untuk memancing lebih banyak wisatawan. Pembenahan akan dilakukan mulai dari trotoar, taman, sampai transportasi [17].

### 3.3. Studi Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh Samuel Hartono menyatakan bahwa alun-alun merupakan identitas kota Tuban dimasa lampau. Dari kehadiran alun-alun serta bangunan yang ada disekitarnya, terlihat sejarah masa lalu kotanya. Pada masa kolonial, Tuban menjadi sebuah kota Kabupaten kecil yang kurang berarti. Tapi alun-alun Tuban ( salah satu alun-alun yang terluas di Jawa) tetap berdiri sebagai sisa-sisa kemegahan kotanya dimasa lampau. Pada awal abad ke 21, kota ini berusaha bangkit dengan penataan kembali daerah alun-alun sebagai pusat kota dan sekaligus juga jati diri kotanya [18].

Perkembangan sebuah pusat kota dalam upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sosial masyarakat dapat dilihat dari keberadaan ruang terbuka publiknya serta seberapa besar pemanfaatannya, karena kedepannya ketersediaan ruang terbuka publik akan semakin sulit didapatkan, sehingga penting merencanakan ruang publik yang sudah ada agar tidak hilang akibat kurang pemanfaatan ruang tersebut bagi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Penelitian yang dilakukan oleh Adhitama mengambil studi kasus di alun – alun Merdeka kota Malang. Dimana kondisi

alun – alun Merdeka Malang yang ada sekarang penataannya lebih di fungsikan sebagai ruang terbuka hijau di tengah kota dari pada pemanfaatan sebagai ruang yang menampung aktifitas publik. Untuk itu perlu penataan setting fisik alun – alun yang dapat berfungsi, baik sebagai ruang terbuka hijau serta dapat mewadahi berbagai perilaku dan aktivitas publik di pusat kota. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penataan setting fisik dalam ruang publik, dapat mempengaruhi perilaku pengguna dalam beraktifitas di dalam alun – alun [19].

I Gusti Bagus Utama dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa sebagian besar kota-kota di Indonesia layak untuk dikembangkan sebagai wisata kota jika dilihat dari beberapa komponen yang menjadi sumberdaya sebuah kota. Komponen-komponen tersebut adalah adanya balai kota, kawasan jalan yang bermakna mitos dan nostalgia, monumen kota yang bermakna historis, kuliner khas kota, kampus atau universitas, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, alun-alun, taman kota, museum kota, pasar malam, dan sumberdaya lainnya. Untuk dapat menjadikannya sebagai produk wisata, diperlukan integrasi aspek-aspek terkait yang terdiri dari aspek daya tarik kota, aspek transportasi, aspek fasilitas utama dan pendukung, dan aspek kelembagaan berupa atribut sumberdaya manusia, sistem, dan kelembagaan terkait lainnya. Kota sebagai pusat bisnis merupakan Sentrum dari aktivitas para wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara memerlukan pengelolaan dan penataan. Penataan yang mendesak untuk dilakukan adalah penataan sentra bisnis masyarakat lokal, penataan penginapan, hotel, dan sejenisnya, penataan daerah atraksi wisata [20].

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dkk menyatakan bahwa alun alun Bandung merupakan hasil warisan ciri kota tradisional yang dibangun oleh penguasa kolonial yang merupakan pusat ruang terbuka kota. Dari masa kemasa Alun-alun kota Bandung telah mengalami beberapa kali perubahan, baik bentuk maupun fungsinya sehingga

mengakibatkan degradasi makna terhadap fungsinya bagi masyarakat Kota Bandung itu sendiri. Penilaian baik terhadap korelasi variabel bebas yaitu persepsi masyarakat terhadap variabel terikat yaitu Alun-alun Kota Bandung, setiap kali pertanyaan yang berkenaan dengan Persepsi masyarakat terhadap Alun-alun Kota Bandung akan mempengaruhi nilai hasil pengujian yang cenderung meningkat akan keberadaan Alun-alun itu sendiri. Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk mengangkat kembali citra Alun-alun Kota Bandung sebagai ruang publik atau (Central Square) [21].

#### 4. KESIMPULAN

Alun-Alun Kidul Keraton Kasunanan Surakarta menjadi potensi rekreasi bagi masyarakat berpenghasilan menengah-kecil. Selain itu, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan Kasunanan Surakarta melarangnya menjadi tempat permanen bagi para pedagang kaki lima. Selain itu, berbagai studi empiris menunjukkan pentingnya pengelolaan dan penataan Alun-Alun Kidul Keraton Kasunanan Surakarta sebagai tempat rekreasi kecil untuk umum sambil mengakomodasi PKL mengarah pada situasi yang baik dan adil bagi semua pihak.

#### REFERENSI

- [1] H. Nitinagoro, *Babad Keraton Surakarta*. Semarang: Grafika Citra, 2011.
- [2] E. Ruwaidah, "Konsep Alun-Alun Utara Surakarta Berdasarkan Persepsi Masyarakat," *Media Bina Ilm.*, 2012.
- [3] K. Kusumastuti, "Pengaruh Budaya Dalam Pembentukan Ruang Kota Sala Sejak Perpindahan Kraton Sampai Dengan Peletakan Motif Dasar Kolonial," *Reg. J. Pembang. Wil. dan Perenc. Partisipatif*, 2017, doi: 10.20961/region.v7i1.5786.
- [4] D. T. Haryanti, "Kajian pola pemanfaatan ruang terbuka publik kawasan bundaran simpang lima semarang," 2008.
- [5] A. B. Junianto, J. Gunawan, and T. B.

- W. Rahardjo, "Sport leisure outdoor equipment design for senior citizen, case study in the North Jakarta region-Indonesia," in *i-CREATE 2010 - International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology*, 2010.
- [6] R. Arif, *Pengaruh PKL Terhadap Historis Kraton Kasunanan Surakarta*. Bandung: Lembaga Penelitian Mahasiswa Institut Teknologi Bandung.
- [7] S. N. A. dkk Zaida, "Surakarta: Perkembangan Kota Sebagai Akibat Pengaruh Perubahan Sosial Pada Bekas Ibukota Kerajaan Di Jawa," *J. Lanskap Indones. (Departemen Arsit. Lanskap Fak. Pertan. Inst. Pertan. Bogor)*, vol. 2, no. 2, 2010, doi: 10.29244/jli.2010.2.2.%p.
- [8] K. Hadinoto, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1996.
- [9] Junianto, *Eksplorasi Karakter Spasial Kawasan Alun-Alun Kota Malang*, vol. II, no. September. 2010.
- [10] R. Indonesia, *Kamus Tata Ruang*. Jakarta: Dinas Jendral Pekerjaan Umum dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, 1997.
- [11] R. Ramadhan, "Perubahan Sosial – Ekonomi PKL (Pedagang Kaki Lima) dalam Program Sentralisasi Sektor Informal Perkotaan di DTC Wonokromo 1," *J. Univ. Airlangga*, 2003.
- [12] R. Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*. Surakarta: Wali Kota Madya Kepala Daerah, 1995.
- [13] A. Putra, "Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Asongan," *andickaputra.blogspot.com*, 2016. .
- [14] Usman, *Negara vs Kaum Miskin*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- [15] Z. K.- Archigreen and undefined 2018, "Revitalisasi Kawasan Wisata Kota Medan sebagai Upaya Meningkatkan Nilai Sosial dan Budaya: Studi Kasus Kawasan Pagaruyung Kota Medan," *Jurnal.Pancabudi.Ac.Id*, 2016.
- [16] H. S. Arifin, "Revitalisasi Ruang Terbuka Biru Sebagai Upaya Manajemen Lanskap Pada Skala Bio-Regional," *Risal. Kebijak. Pertan. DAN Lingkungan. Rumusan Kaji. Strateg. Bid. Pertan. dan Lingkungan.*, 2015, doi: 10.20957/jkebijakan.v1i3.10294.
- [17] C. I. Tri Wahyuni, "Survei: Bandung Kota Terfavorit Wisatawan Se-ASEAN," *CNN Indonesia*, 2015. .
- [18] Samuel Hartono, "Alun-Alun Dan Revitalisasi Identitas Kota Tuban," *Dimens. (Jurnal Tek. Arsitektur)*, 2005.
- [19] M. S. Adhitama, "Faktor Penentu Setting Fisik Dalam Beraktifitas Di Ruang Terbuka Publik 'Studi Kasus Alun – Alun Merdeka Kota Malang,'" *Rev. Urban. Archit. Stud.*, 2013, doi: 10.21776/ub.ruas.2013.011.02.1.
- [20] I. G. B. R. Utama, "Daya tarik wisata kota Denpasar bali," *Daya Tarik Wisata Kota Denpasar Bali*, 2016, doi: 10.13140/RG.2.1.2215.8568.
- [21] H. Wibowo, R. S. Rukayah, and A. Suprapti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Alun-Alun Kota Bandung Sebagai Ruang Terbuka Publik," *Teknik*, 2015, doi: 10.14710/teknik.v36i1.7268.